BAB IV
ANALISIS PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1.1 Analisis Sistem Yang Berjalan

Analisis yang yang berjalan pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berjalan dari data-data secara manual yang dimasukan kedalam sistem tersebut tetapi sangat tidak efektif sebab yang memasukan data kedalam sistem tersbut di bagian DPPKAD hanya beberapa orang saja yang dapat menggunakannya.Oleh karena itu sedang dilakukan sosialisasi terhadap sistem tersebut agar seluruh pegawai di bagian DPPKAD semua divisinya dapat menggunakan sistem tersebut dan tidak menggunakan secara manuan lagi.Berikut ini merupakan gambaran Sistem yang di gunakan untuk mengelolah data keuangan yang di khususkan pada divisi peberimaan pajak.



Gambar 4.1 Tampilan awal sistem SIPKD.



Gambar 4.2 Admin memasukan ID dan Password.



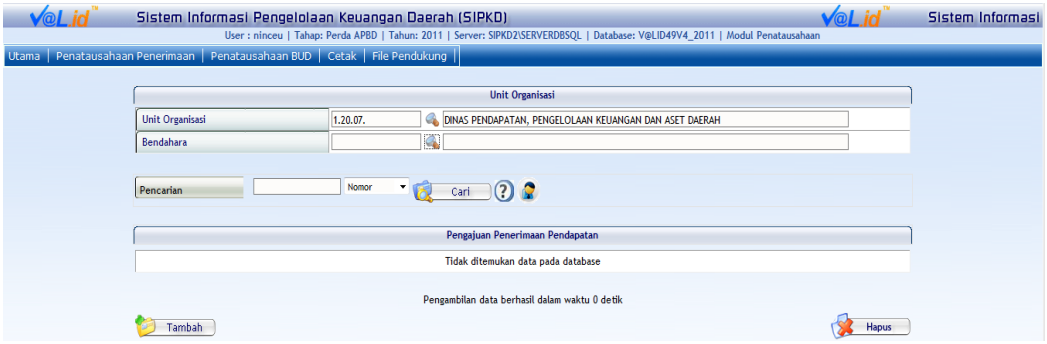
Gambar 4.3 Admin memilih bagian pengajuan untuk memasukan data.



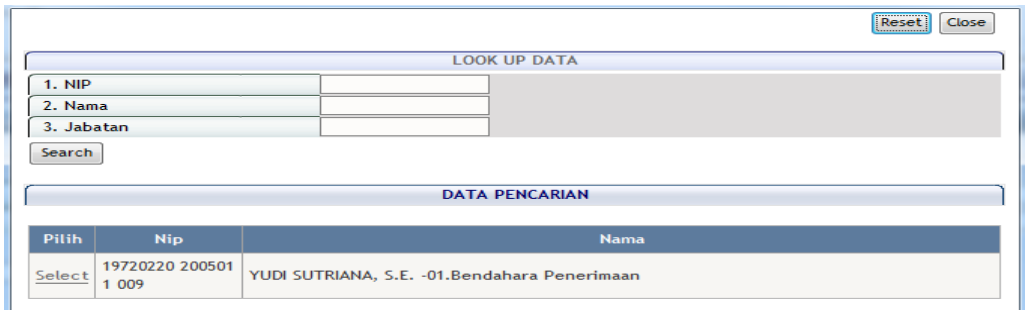
Gambar 4.4 Memasukan unit operasi yang akan di kerjakan.



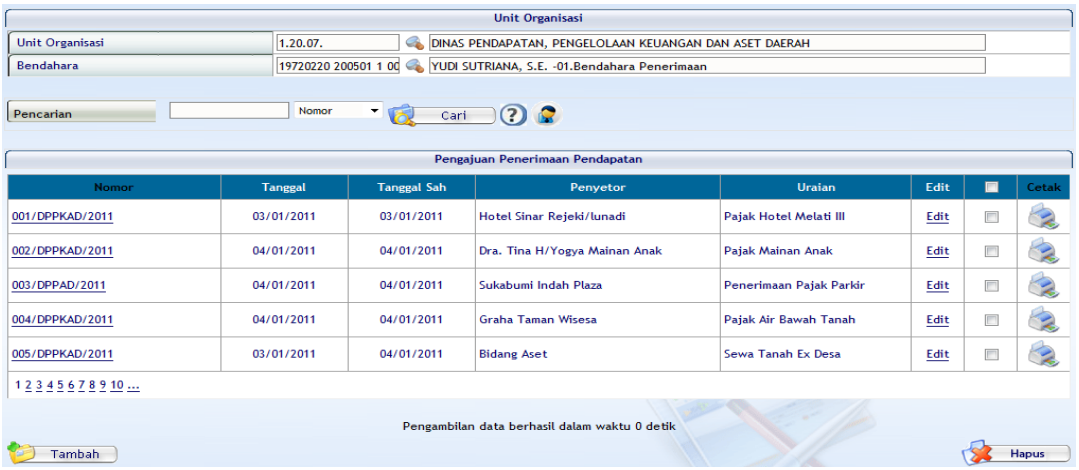
Gambar 4.5 Memilih bagian DPPKAD untuk masuk ke sistem pengajuan DPPKAD.



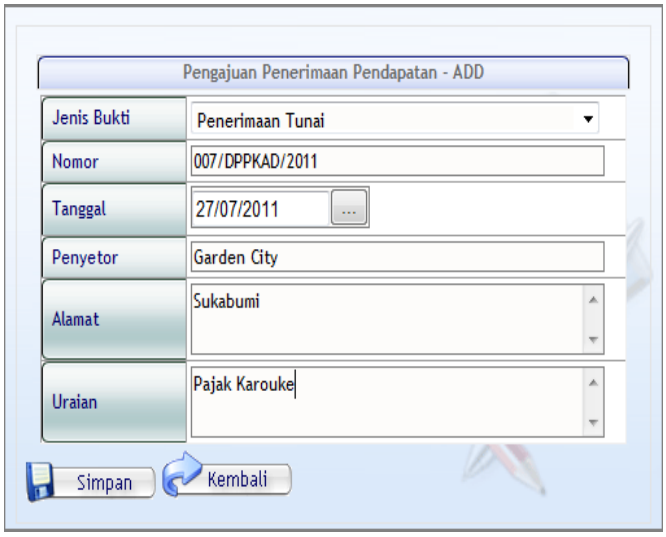
Gambar 4.6 Bagian DPPKAD sudah terpilih didalam sistem pengajuan.



Gambar 4.7 Masukan ID kepala Bendahara Bagian DPPKAD.



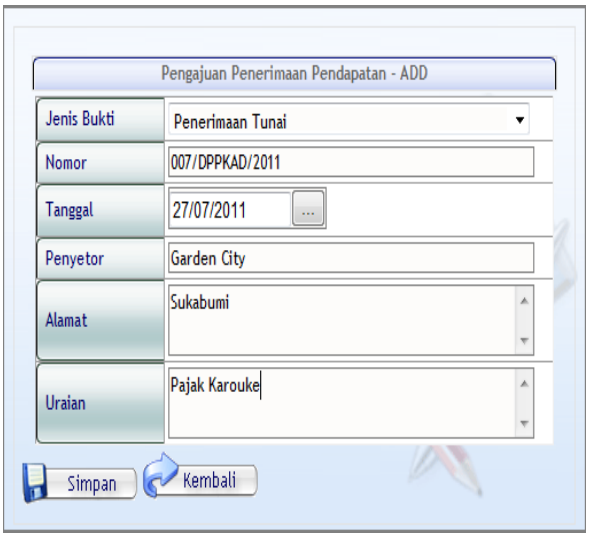
Gambar 4.8 Admin sudah masuk kedalam sistem pengajuan DPPKAD.



Gambar 4.9 Tampilan ketika akan menambahkan atau memasukan data didalam Sistem pengajuan



Gambar 4.10 Masuk ke dalam sistem pengajuan pendapatan



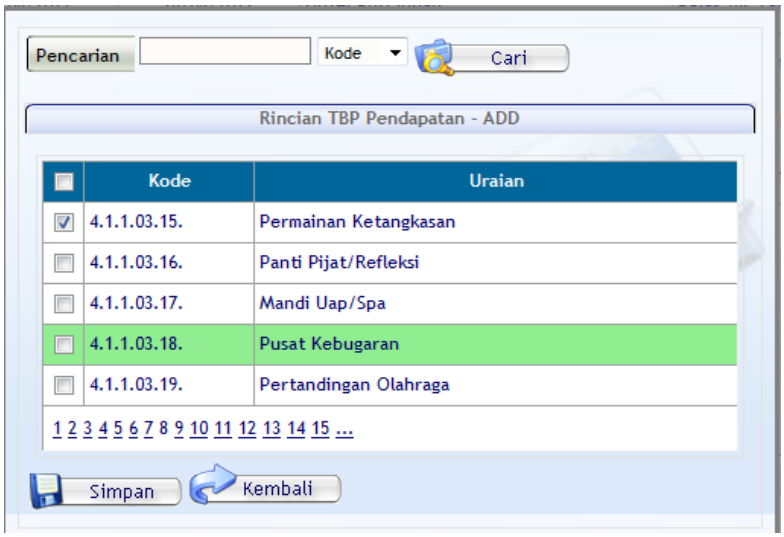
Gambar 4.11 Masukan transaksi yang diajukan



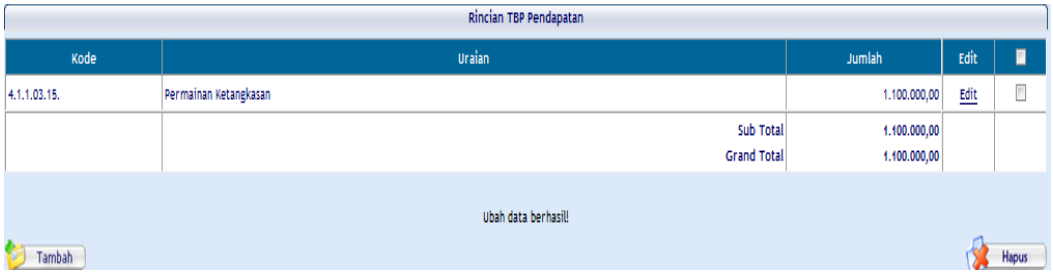
Gambar 4.12 Masuk kedalam sistem persetujuan pendapatan



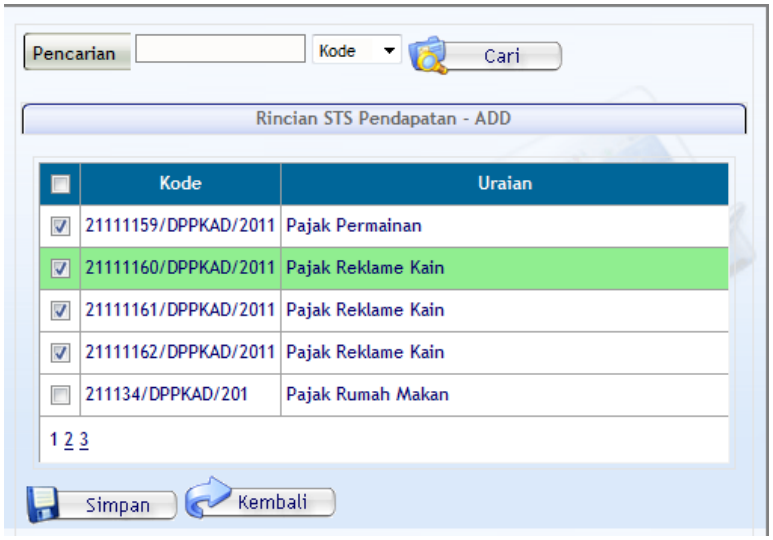
Gambar 4.13 Masukan data dan tanggal transaksi yang akan di setujukan



Gambar 4.14 Memilih kode transaksi pajak yang sudah tersedia didalam sistem



Gambar 4.15 Nominal yang harus di bayar oleh perusahaan.



Gambar 4.16 Memilih kategori pajak yang sudah di masukan dari awal.



Gambar 4.17 Kategori-kategori pajak yang sudah dimasukan.

4.1.1 Analisis Dokumen

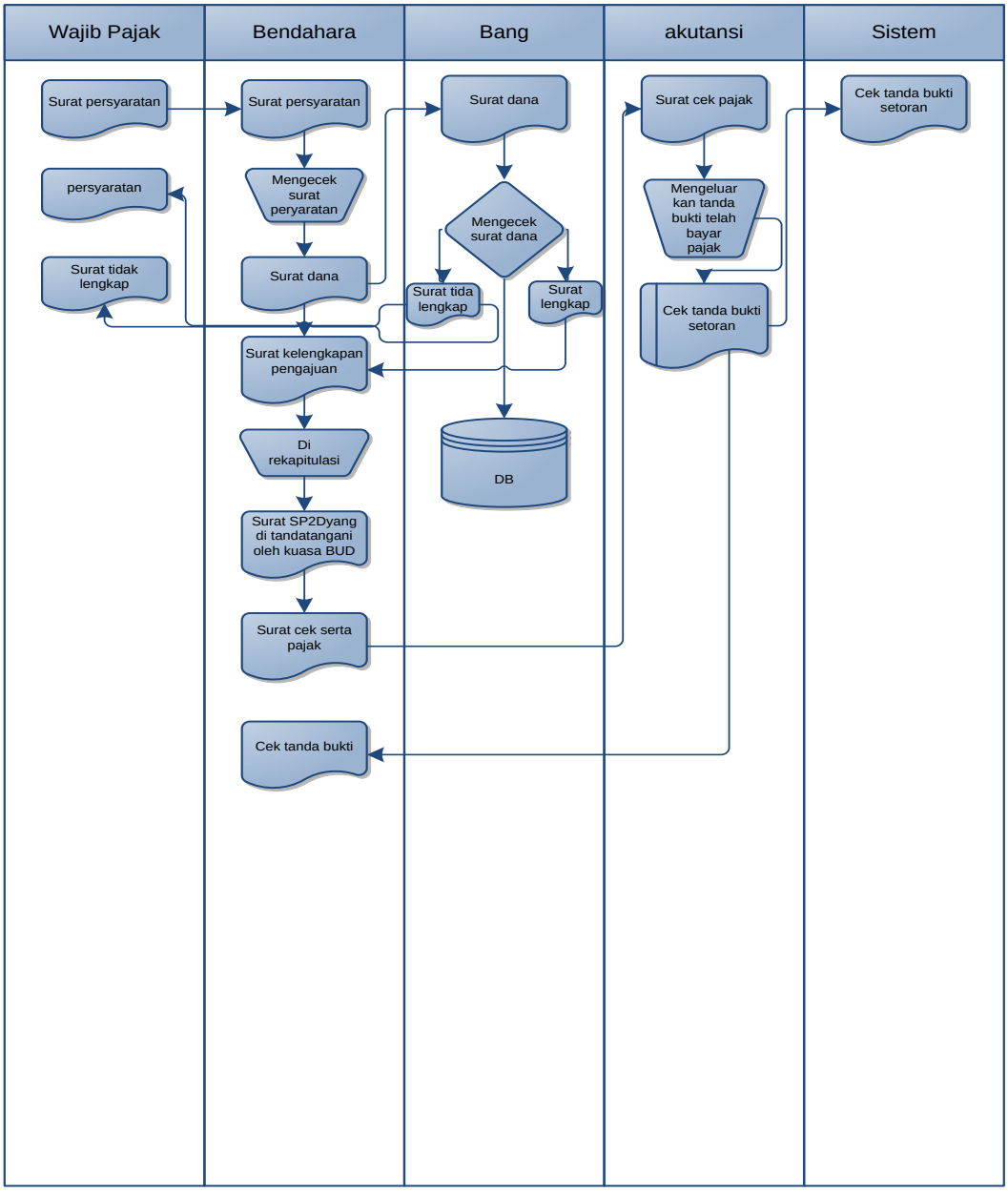
No	Nama Dokumen	Fungsi
1	DPP (Daftar Penerima Pajak)	Sebagai daftar nama wajib pajak dan total yang harus dibayarkan
2	SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana)	Sebagai surat kuasa dari bagian keuangan yang di pegang oleh pembayar pajak untuk mencairkan dana di bank
3	Daftar Penguji SP2D	Sebagai surat nominal pajak yang harus dibayarkan dan akan diperiksa dahulu oleh bendahara
4	Cek	Sebagai bukti jumlah nominal yang harus dibayarkan
5	STS (Surat Tanda Setoran)	Tanda Bukti Setoran dari Bendahara Penerima untuk bagian Akuntansi, Kas Daerah, Bank, Perbendaharaan dan Dinas Pendapatan
6	NPWP (Nomor Pemegang Wajib Pajak)	Identitas milik wajib pajak untuk digunakan pada saat membayar pajak
7	Rekening	Sebagai bukti kode transakasi

Tabel 4.1.1.1 Analisis Dokumen.

4.1.2 Analisis Prosedur yang sedang Berjalan

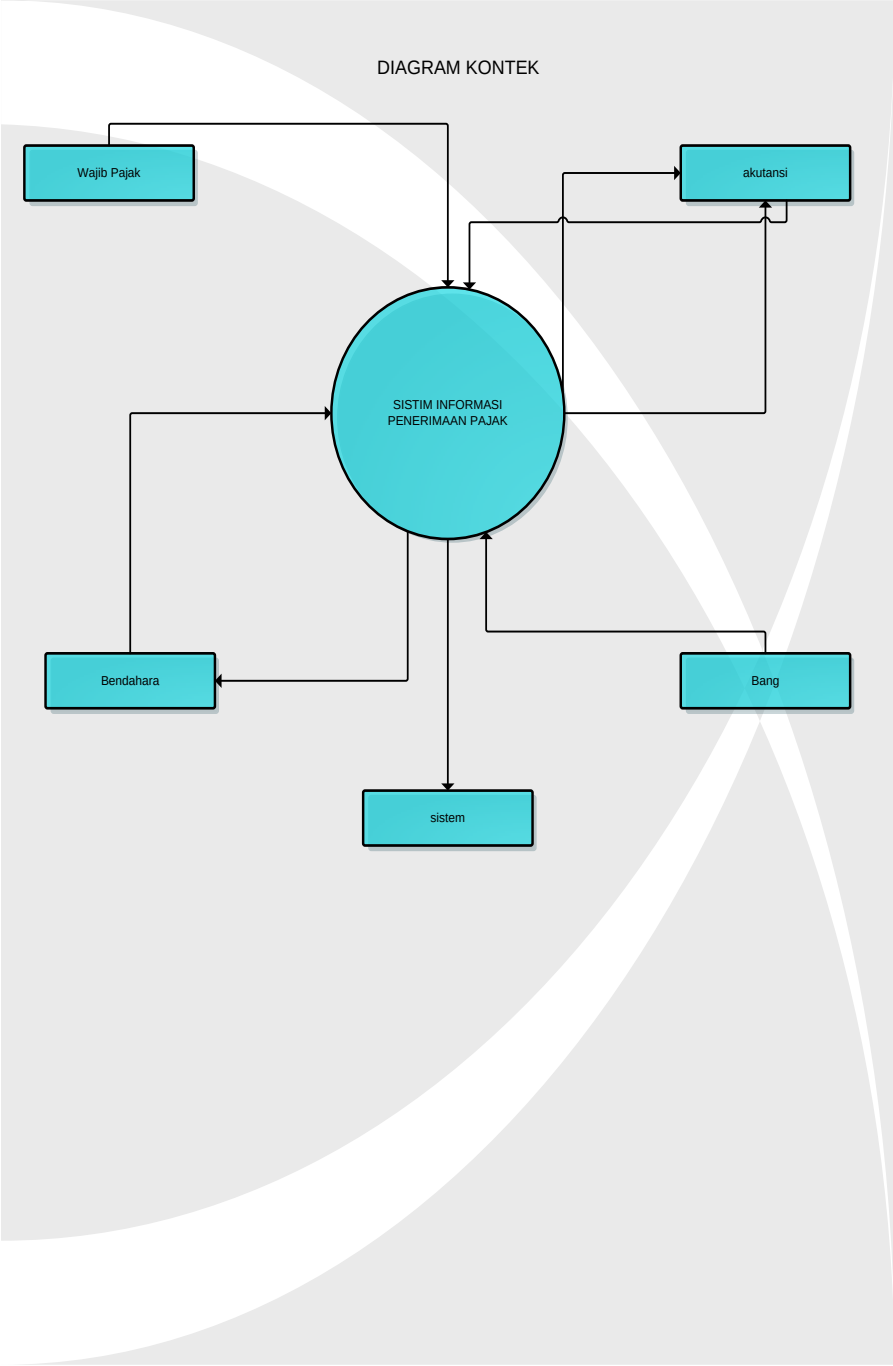
Analisis prosedur yang sedang berjalan dapat di gambarkan pada 3 prosedu di bawah ini.

4.1.2.1 Flow Map



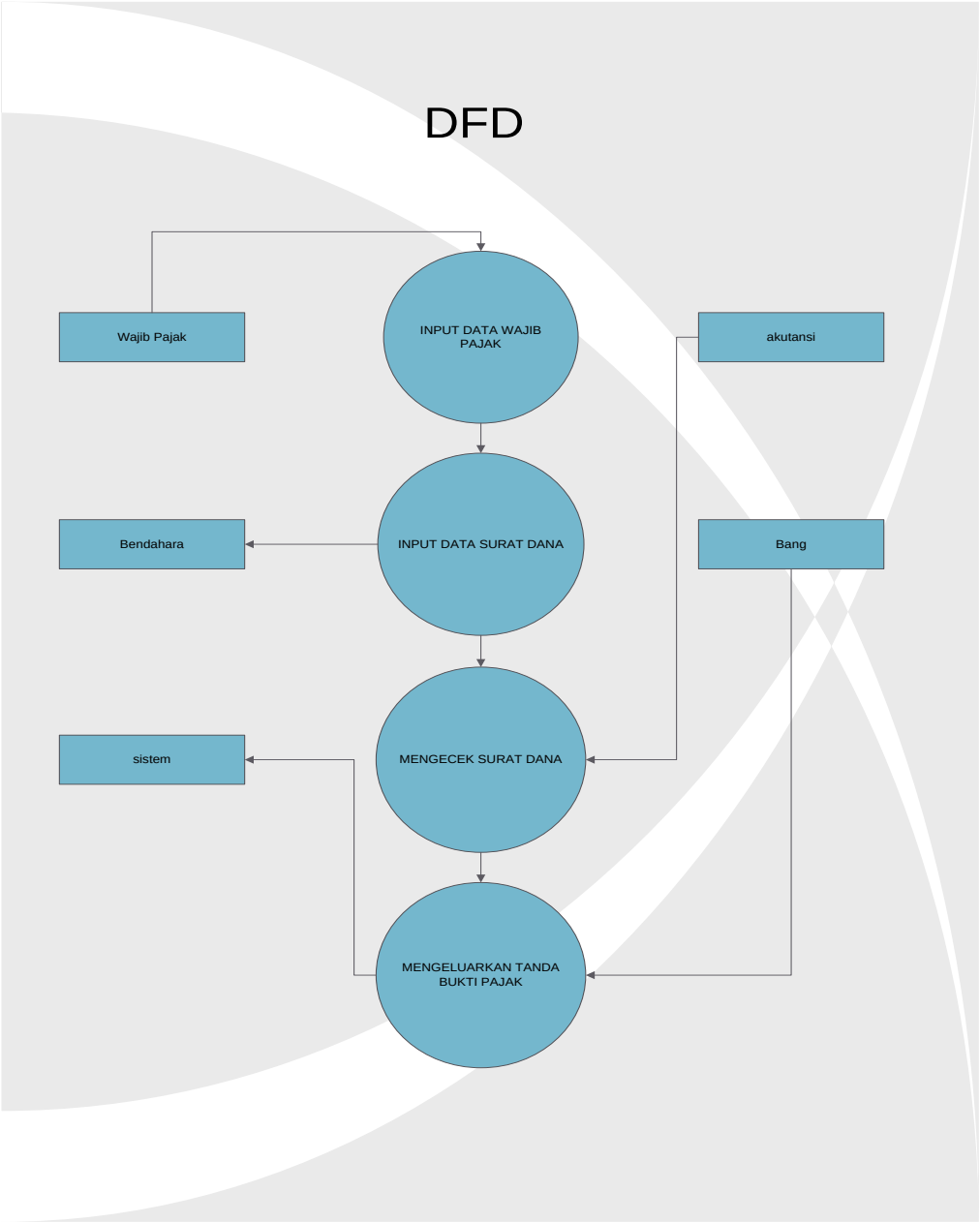
Gambar 4.1.2.1.1 Flow Map.

4.1.2.2 Diagram Kontek



Gambar 4.1.2.2.2 Diagram Kontek

4.1.2.3 Data Flow Diagram



Gambar 4.1.2.3.3 Data Flow Diagram.

1.1.3 Evaluasi Sistem yang berjalan

Sistem yang selama ini ada sebetulnya sudah berjalan namun hanya sebatas input data, masih banyak penambahan dan perubahan yang perlu dilakukan pada sistem tersebut hingga dapat menghasilkan sebuah sistem informasi sebagimana yang diharapkan dapat lebih lengkap, efektif, efesien dan terkomputerisasi semuanya hingga akhir pada proses pencetakan.

Sistem yang ada hanya sebatas input data menggunakan aplikasi Microsoft Exel saja yang masih banyak sekali panambahan dan perubahan pada aplikasi tersebut, sehingga dapat tercipta sebuah sistem informasi yang sebagaimana diharapkan. Penambahan dan perubahan yang perlu dilakukan pada sistem informasi ini antara lain perlu adanya sebuah proses yang sistematis sehingga aplikasi yang ada bisa melakukan pendataan, penghitungan dan pemrosesan lainnya pada beberapa data yang telah terinputkan.Sehingga yang tercipta tidak akan ada lagi proses manual setelah data yang telah terinputkan kedalam aplikasi yang ada dan bisa menghasilkan sebuah proses data yang lebih baik hingga terciptanya sebuah sistem informasi sebagaimana yang diharapkan.

Sistem ini juga perlu diadakan pelatihan kepada para pegawai agar para pegawai dapat menggunakan sistem tersebut.agar tidak segelintir pegawai di divisi tersebut yang bisa menggunakan sistem informasi tersebut.